

Peran Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Agama di Makkah dan Kepala Negara di Madinah

***¹Muhammad Faisal, ²Ansar Tohe**

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

email: *¹7711fsya@gmail.com, ²ansartohe7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the transformation of Prophet Muhammad's (peace be upon him) leadership from his role as a religious leader in Mecca to his dual role as both religious and political leader in Medina, as well as to examine its relevance to contemporary concepts of leadership and governance. The research employed a qualitative approach using library research by analyzing primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical *sīrah* literature, books, and scholarly journal articles. Data were collected through documentation techniques and analyzed descriptively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the Prophet's leadership developed in response to changing social and political circumstances without altering the fundamental objectives of Islam. During the Meccan period, his leadership emphasized faith, moral education, and spiritual development, while in Medina it evolved into an integrated model combining religious guidance with state administration through principles of justice, consultation (*shūrā*), equality, and social welfare, as reflected in the Constitution of Medina. The study concludes that the Prophet's leadership represents a contextual and adaptive model whose universal values remain relevant for contemporary governance while allowing institutional flexibility according to societal needs.

Keywords: *Prophet Muhammad, Mecca, Medina, Islamic leadership, Medina Charter*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari kepala agama di Makkah menjadi kepala agama sekaligus kepala negara di Madinah serta mengkaji relevansinya terhadap konsep kepemimpinan dan pemerintahan pada masa kontemporer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab *sīrah*, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berkembang secara dinamis sesuai perubahan kondisi sosial dan politik tanpa mengubah tujuan utama dakwah Islam. Pada periode Makkah, kepemimpinan berfokus pada penguatan akidah, pembentukan akhlak, dan pembinaan spiritual, sedangkan pada periode Madinah berkembang menjadi kepemimpinan yang mengintegrasikan fungsi keagamaan dan pemerintahan melalui prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, dan kemaslahatan masyarakat sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bersifat kontekstual, adaptif, dan tetap relevan sebagai landasan pengembangan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan pada era modern.

Kata Kunci: *Nabi Muhammad SAW, Mekkah, Madinah, kepemimpinan Islam, Piagam Madinah*

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh sentral dalam sejarah Islam yang membawa perubahan besar tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, hukum, dan peradaban. Kehadiran beliau sebagai pembawa risalah Islam telah mengubah tatanan masyarakat Arab yang sebelumnya diliputi oleh praktik kemusyrikan, konflik antarsuku, ketimpangan sosial, serta lemahnya supremasi hukum. Dalam perspektif sejarah, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menunjukkan karakter yang dinamis dan adaptif terhadap kondisi masyarakat yang dihadapi. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala agama di Mekkah dan sebagai kepala agama sekaligus kepala negara di Madinah menjadi penting untuk memahami konsep kepemimpinan Islam secara utuh, baik dari sisi normatif maupun historis.¹

Pada periode Mekkah, fokus utama dakwah Nabi Muhammad SAW adalah membangun fondasi akidah dan memperkuat nilai-nilai moral masyarakat melalui ajaran tauhid. Kondisi sosial-politik Mekkah yang berada di bawah dominasi kaum Quraisy menyebabkan Nabi Muhammad SAW belum memiliki otoritas politik untuk membentuk sistem pemerintahan. Strategi dakwah yang diterapkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, pendidikan akhlak, dan pembinaan keimanan. Dengan demikian, kepemimpinan beliau pada fase ini lebih menampilkan dimensi spiritual sebagai pembimbing umat tanpa didukung oleh kekuasaan negara.²

Perubahan signifikan terjadi setelah peristiwa Hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Di kota tersebut, Nabi Muhammad SAW memperoleh legitimasi sosial dan politik dari masyarakat sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara. Kepemimpinan beliau diwujudkan melalui pembentukan masyarakat madani yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan (*ukhuwwah*), musyawarah (*syūrā*), serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga tanpa membedakan agama maupun suku. Salah satu pencapaian penting pada masa ini adalah lahirnya Piagam Madinah yang menjadi dasar pengaturan hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok masyarakat lainnya dalam satu komunitas politik yang damai dan tertib.³

Fenomena perubahan peran Nabi Muhammad SAW dari pemimpin agama di Mekkah menjadi pemimpin agama sekaligus kepala negara di Madinah menunjukkan bahwa implementasi ajaran Islam berlangsung secara kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Dinamika tersebut memberikan gambaran bahwa kepemimpinan Islam tidak hanya

¹ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013).

² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

³ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: Oxford University Press, 1956).

berorientasi pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, penyelesaian konflik, serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kajian terhadap perubahan peran ini menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perdebatan akademik mengenai konsep relasi agama dan negara dalam Islam. Sebagian pemikir berpendapat bahwa Islam merupakan sistem yang menyatukan dimensi agama dan pemerintahan, sedangkan sebagian lainnya memandang bahwa praktik politik Nabi Muhammad SAW lebih bersifat historis dan kontekstual daripada doktrin yang wajib diterapkan secara formal pada setiap zaman. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan masih adanya ruang kajian yang memerlukan analisis mendalam berdasarkan sumber-sumber sejarah Islam yang otoritatif, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang objektif mengenai karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari aspek dakwah, keteladanan moral, atau sistem pemerintahan Islam secara terpisah. Namun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan transformasi peran beliau antara periode Mekkah dan Madinah serta implikasinya terhadap konsep kepemimpinan Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis historis dan normatif terhadap perubahan fungsi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berdasarkan kondisi sosial-politik yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai evolusi kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai bagian dari proses pembentukan masyarakat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala agama di Mekkah dan sebagai kepala agama sekaligus kepala negara di Madinah, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transformasi kepemimpinan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji relevansi konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terhadap wacana hubungan agama dan negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah peradaban Islam, pemikiran politik Islam, dan hukum tata negara Islam, sekaligus menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat yang ingin memahami konsep kepemimpinan Rasulullah SAW secara lebih komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, sejarah, dan pemikiran mengenai peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala agama di Mekkah serta sebagai

kepala agama sekaligus kepala negara di Madinah melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan perubahan peran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berdasarkan konteks sosial, politik, dan keagamaan pada kedua periode tersebut. Penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026 selama proses penyusunan artikel ilmiah. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka tidak dilakukan penelitian lapangan. Kegiatan penelitian dilaksanakan melalui penelusuran berbagai sumber pustaka yang diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi maupun sumber digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Target penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada dua fase dakwah, yaitu periode Makkah dan Madinah. Penelitian juga bertujuan mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan spiritual dan politik Nabi Muhammad SAW serta relevansinya terhadap konsep hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam.

Subjek penelitian berupa berbagai dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi: Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Kitab-kitab sirah nabawiyah dan sejarah Islam klasik, Buku-buku ilmiah mengenai sejarah peradaban Islam, politik Islam, dan ketatanegaraan Islam, Artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, maka tidak terdapat populasi dan sampel sebagaimana pada penelitian lapangan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Menentukan fokus penelitian mengenai perbedaan peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala agama di Makkah dan sebagai kepala agama sekaligus kepala negara di Madinah, Mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian, Menyeleksi dan mengklasifikasikan data berdasarkan aspek sejarah, kepemimpinan, politik, dan pemerintahan Islam. Menganalisis data secara sistematis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta perkembangan peran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada kedua periode tersebut.

Menyusun hasil analisis dalam bentuk pembahasan yang sistematis serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam menentukan sumber data, mengumpulkan informasi, mengklasifikasikan data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan. Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan lembar dokumentasi, catatan penelitian, dan perangkat pengelolaan referensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut berupa Al-Qur'an, hadis, kitab sirah,

buku ilmiah, artikel jurnal, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Mekkah, kepemimpinan di Madinah, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan peran, serta implikasinya terhadap konsep hubungan agama dan negara dalam Islam. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks sejarahnya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi primer dan sekunder yang memiliki otoritas di bidang sejarah Islam, sirah nabawiyah, dan pemikiran politik Islam. Selain itu, dilakukan telaah kritis terhadap setiap sumber agar data yang digunakan memiliki validitas, konsistensi, dan relevansi dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan yang terdiri atas Al-Qur'an, hadis, kitab sirah nabawiyah, buku sejarah Islam, dan artikel ilmiah, ditemukan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua fase kepemimpinan yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu fase Mekkah sebagai periode penguatan kepemimpinan keagamaan dan fase Madinah sebagai periode integrasi antara kepemimpinan agama dan pemerintahan. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan perubahan terhadap tujuan dakwah Islam, melainkan perubahan strategi kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masing-masing periode.⁴

A. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Agama di Mekkah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode Mekkah Nabi Muhammad SAW menjalankan perannya sebagai pemimpin agama dengan menitikberatkan pada pembinaan akidah, pembentukan akhlak, serta penanaman nilai-nilai tauhid. Fokus utama dakwah bukanlah membangun kekuasaan politik, melainkan membentuk pribadi dan masyarakat yang memiliki keimanan serta integritas moral.⁵ Kondisi masyarakat Mekkah yang masih didominasi oleh sistem kesukuan, penyembahan berhala, dan ketimpangan sosial menyebabkan strategi dakwah dilakukan secara bertahap,

⁴ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013), hlm. 23–30.

⁵ Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 252–260.

dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian dilanjutkan secara terbuka setelah jumlah pengikut Islam mulai bertambah.⁶

Temuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada fase Makkah dibangun melalui keteladanan pribadi (*uswah hasanah*), kejujuran (*al-Amīn*), serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam situasi belum memiliki kekuasaan politik, beliau mengedepankan pendekatan persuasif, pendidikan, dan pembinaan spiritual dibandingkan penggunaan kekuatan.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam Islam diawali melalui transformasi moral individu sebagai fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang berkeadaban.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan para sejarawan Islam yang menyatakan bahwa periode Makkah merupakan fase pembentukan karakter umat (*marḥalah at-takwīn*), yaitu masa ketika nilai-nilai dasar Islam ditanamkan sebelum terbentuknya institusi politik dan pemerintahan.⁸ Oleh karena itu, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada fase ini lebih tepat dipahami sebagai kepemimpinan moral dan spiritual yang menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat Islam pada periode berikutnya.

B. Hijrah sebagai Transformasi Kepemimpinan

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah merupakan titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah Islam. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat tinggal, tetapi merupakan transformasi dari masyarakat yang tertindas menuju masyarakat yang memiliki kemandirian politik. Dukungan kaum Anshar memberikan legitimasi sosial kepada Nabi Muhammad SAW untuk membangun kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah hijrah, orientasi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berkembang dari pembinaan akidah menuju pembangunan sistem sosial yang lebih luas. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Madinah yang lebih terbuka terhadap kepemimpinan beliau dan memiliki kebutuhan akan penyelesaian konflik antarsuku yang telah berlangsung cukup lama.¹⁰

Dari perspektif teori kepemimpinan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kemampuan adaptif dalam menyesuaikan strategi kepemimpinan dengan kondisi sosial yang berkembang. Nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar utama, sedangkan bentuk implementasinya berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁶ Ṣafīyyur-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *Ar-Raḥīq al-Makhtūm* (Riyadh: Darussalam, 2002), hlm. 87–101.

⁷ Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources* (Rochester: Inner Traditions, 2006), hlm. 80–95.

⁸ Muhammad al-Ghazali, *Fiḥ al-Sirah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 102–110.

⁹ Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, hlm. 129–145.

¹⁰ Akram Diya al-Umari, *Madinan Society at the Time of the Prophet* (Herndon: IIIT, 1991), hlm. 45–59.

C. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Agama dan Kepala Negara di Madinah

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Madinah Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, keamanan, diplomasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua fungsi tersebut dijalankan secara terpadu sehingga tidak terjadi pemisahan antara aspek spiritual dan aspek sosial-politik.¹¹

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa Piagam Madinah menjadi dasar terbentuknya masyarakat politik yang plural. Piagam tersebut mengatur hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok-kelompok lainnya berdasarkan prinsip persamaan hak, kebebasan beragama, tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme yang adil.¹²

Hasil ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak dibangun atas dasar dominasi suatu kelompok, melainkan berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara.¹³ Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa negara Madinah merupakan model pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat. Selain menyusun Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW juga membangun masjid sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, peradilan, dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan pada masa Nabi memiliki fungsi yang sangat luas dalam mendukung kehidupan masyarakat secara menyeluruh.¹⁴

D. Analisis Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW didukung oleh beberapa karakteristik utama, yaitu berbasis wahyu, adaptif terhadap perubahan sosial, berorientasi pada keadilan, dan mengintegrasikan aspek spiritual dengan pemerintahan.¹⁵

Pertama, seluruh kebijakan yang diambil Nabi Muhammad SAW berlandaskan wahyu Allah SWT sehingga memiliki legitimasi moral dan spiritual yang kuat. Kedua, strategi kepemimpinan beliau bersifat kontekstual, terlihat dari perbedaan pendekatan yang digunakan di Makkah dan Madinah tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar Islam. Ketiga, kepemimpinan beliau menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam mengatur hubungan antarmasyarakat, termasuk terhadap kelompok non-Muslim. Keempat, beliau

¹¹ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986), hlm. 15-34.

¹² Ibid., hlm. 35-50.

¹³ Ibid., hlm. 35-50.

¹⁴ Ibnu Katsir, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 213-225.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 51-68.

berhasil mengintegrasikan fungsi agama, sosial, hukum, ekonomi, dan politik dalam satu sistem kepemimpinan yang saling melengkapi.¹⁶

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Nabi Muhammad SAW tidak hanya ditentukan oleh kewenangan politik, tetapi juga oleh kualitas moral, integritas pribadi, kemampuan komunikasi, dan keteladanan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.

E. Relevansi Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Konteks Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW memiliki relevansi yang kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan modern. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah (*syūrā*), persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan prinsip universal yang tetap relevan dalam berbagai sistem pemerintahan.¹⁷

Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan antara periode Makkah dan Madinah menunjukkan fleksibilitas penerapan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, yang bersifat normatif dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pemerintahan, sedangkan bentuk kelembagaan dan sistem politiknya bersifat kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan peran Nabi Muhammad SAW dari kepala agama di Makkah menjadi kepala agama sekaligus kepala negara di Madinah merupakan proses evolusi kepemimpinan yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan perkembangan masyarakat¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan politik masyarakat. Pada periode Makkah, Nabi Muhammad SAW berperan sebagai kepala agama yang memfokuskan dakwah pada penguatan akidah, pembinaan akhlak, dan transformasi moral masyarakat melalui pendekatan persuasif tanpa didukung kekuasaan politik formal. Kepemimpinan pada fase ini menjadi fondasi utama bagi terbentuknya masyarakat Islam yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemanusiaan.

Setelah peristiwa hijrah ke Madinah, peran Nabi Muhammad SAW berkembang menjadi kepala agama sekaligus kepala negara. Dalam kapasitas tersebut, beliau tidak hanya membimbing kehidupan spiritual umat, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan,

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 37-49.

¹⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 3-21.

¹⁸ John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, 5th ed. (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 35-48.

musyawarah, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Penyusunan Piagam Madinah menjadi bukti bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mampu mengintegrasikan fungsi keagamaan dan kenegaraan secara harmonis dalam menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah bukan merupakan perubahan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, melainkan bentuk adaptasi strategi kepemimpinan terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berbeda. Dengan demikian, nilai-nilai universal seperti keadilan, amanah, musyawarah, toleransi, serta kemaslahatan merupakan prinsip utama yang tetap relevan sebagai landasan kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan pada masa kini, tanpa harus terikat pada bentuk sistem politik tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW melalui pendekatan yang lebih luas, seperti studi historis-komparatif, analisis pemikiran para ulama klasik dan kontemporer, maupun penelitian empiris mengenai implementasi nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam sistem pemerintahan modern di negara-negara Muslim. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kehidupan masyarakat multikultural di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013).
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: Oxford University Press, 1956).
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2013), hlm. 23-30.
- Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 252-260.
- Şafiyyur-Raḥmān al-Mubārakfūrī, *Ar-Raḥīq al-Makhtūm* (Riyadh: Darussalam, 2002), hlm. 87-101.
- Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources* (Rochester: Inner Traditions, 2006), hlm. 80-95.
- Muhammad al-Ghazali, *Fiqh al-Sirah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 102-110.
- Martin Lings, *Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources*, hlm. 129-145.
- Akram Diya al-Umari, *Madinan Society at the Time of the Prophet* (Herndon: IIIT, 1991), hlm. 45-59.
- Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1986), hlm. 15-34.
- Ibid.*, hlm. 35-50.



Ibid., hlm. 35-50.

Ibnu Katsir, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 213-225.

Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 51-68.

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 37-49.

Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 3-21.

John L. Esposito, *Islam: The Straight Path*, 5th ed. (New York: Oxford University Press, 2016), hlm. 35-48.